

REFLEKSI REALITAS “SUSTAINABILITY” DALAM PRAKTIK SUSTAINABILITY REPORTING: PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY

Fatmawati¹⁾, Sukriah Natsir²⁾

^{1,2)}Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar

ABSTRACT

In addition to legitimacy theory, the most appropriate theory to disclose corporate social responsibility is Sharia Enterprise Theory (SET), especially for sharia banks. This study aims to explore the reality of sustainability in practice sustainability reporting based on the perspective of Shariah enterprise theory (SET). This research was conducted on the Sharia Banking BUMN company. Lowering the theoretical concept of CSR disclosure based on the concept of Shariah Enterprise Theory (SET) as a foundation in CSR reporting of the banking sector and conformity analysis that is reflected in the report sustainability with SET. The results show that the company reveals vertical accountability to God, horizontal accountability to humans includes responsibility to customers, employees and communities as well as responsibility to nature despite important disclosures that are not addressed in terms of accountability to God and nature.

Keywords: *Corporate social responsibility (CSR), Sustainability reporting, Shariah enterprise theory (SET)*

1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dewasa ini semakin populer terutama pada lingkup dunia usaha. Ditandai dengan meningkatnya praktik tanggung jawab sosial perusahaan, diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Solihin, 2009:4).

Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hanya saja ketiadaan standar CSR secara syariah menjadikan pelaporan CSR perusahaan syariah menjadi tidak seragam dan standar. Standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) tidak dapat dijadikan sebagai suatu standar pengungkapan CSR karena tidak menyebutkan keseluruhan item-item terkait CSR yang harus diungkapkan suatu perusahaan. Penelitian dalam ranah CSR syariah umumnya menggunakan model indeks *Islamic Social Reporting* yang dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI. Menurut beberapa literatur serta berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dijabarkan di atas, salah satu teori yang sering dijadikan sebagai dasar untuk mengkaji praktik *sustainability reporting* adalah *legitimacy theory* (Parsa dan Kouhy, 2002; Tilling, 2004).

Penggunaan *legitimacy theory* sebagai alat analisis akan menunjukkan bahwa praktik *sustainability reporting* yang dilakukan perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memperoleh legitimasi sosial agar direspon positif oleh para pelaku pasar. Apabila ditelusuri lebih mendalam, penggunaan *legitimacy theory* akan menciptakan tendensi bahwa praktik *sustainability reporting* yang dilakukan perusahaan bukanlah untuk kepentingan sosial maupun lingkungan, namun semata-mata sebagai proses legitimasi (pembenaran) atas segala aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memaksimalkan laba. Penggunaan *legitimacy theory* juga seakan-akan melupakan kenyataan bahwa manajemen sebagai pengelola perusahaan adalah makhluk sosial yang memiliki *sense of social*.

Selain *legitimacy theory*, teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah *Syariah Enterprise Theory (SET)* khususnya bagi bank syariah (Meutia, 2010:49). Pada perbankan syariah, nilai-nilai atau norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam yang dikenal dengan nilai-nilai syariah. Berbagai penelitian yang menguji pengaruh CSR telah dilakukan antara lain Deegan dan Gordon (1996) menggunakan teori legitimasi dalam menjelaskan pengungkapan social dalam laporan tahunan. Refleksi realitas *sustainability* juga telah diteliti oleh Dewi (2011) menyingkap praktek *sustainability reporting* berdasarkan paradigma kritis Habermasian perusahaan pertambangan di Indonesia.

¹ Koresponding : Fatmawati, Telp 082194929401, f4teihsan@gmail.com

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang akan mengungkapkan praktek *sustainability reporting* berdasarkan *Syariah Enterprise Theory (SET)* perusahaan perbankan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai realitas “*sustainability*” yang terefleksi dalam praktik *sustainability reporting* pada industri Perbankan ditinjau dari perspektif *syariah enterprise theory (SET)*. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat realitas praktek *sustainability reporting* untuk menyingkap informasi dan memperoleh pemahaman yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sesuai dengan konsep dan karakteristik “*sustainability*” berlandaskan *Syariah Enterprise Theory (SET)*. Bagaimana realitas keselarasan antara idealisme bisnis dengan nilai-nilai spiritual dalam praktik *sustainability reporting* pada perusahaan berbasis syariah.

Konsep Corporate Social Responsibility dalam Islam

Islam sebagai cara hidup memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan jamannya. Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah, namun tidak dalam akidah, ibadah dan akhlaq (Kamali, 1989). Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah (Ahmad, 2002). Hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat dibandingkan dengan konsep konvensional, karena didasarkan pada aspek religius.

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah (*Islamic Social Reporting* atau ISR). Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu: pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.

Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Syariah Enterprise Theory (SET)* tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah. *Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia. Disini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, dan yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Penelitian Terdahulu (State of Art)

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pijakan dalam penelitian ini antara lain adalah penelitian Lehman (1998), Chwastiak dan Young (2003), Dewi (2011) dan Naraduhita dan Sawarjuwono (2012). Penelitian Lehman (1998) dilakukan dalam paradigma *critical*, khususnya *Radical Humanism* menyimpulkan bahwa untuk menyediakan data sosial dan lingkungan, perusahaan dapat menggunakan suatu mekanisme yang memungkinkan keputusan dapat dilegitimasi oleh komunitas melalui cara yang paling adil. Chwastiak dan Young (2003) membuktikan bahwa pembuatan laporan tahunan perusahaan sebenarnya ditujukan sebagai alat melakukan praktek tidak etis untuk kepentingan *Corporate hegemony*. Laporan tahunan hanyalah ekspresi kepentingan perusahaan memaksimalkan keuntungan tanpa peduli aspek sosial-lingkungan-spiritualitas.

Penelitian oleh Dewi (2011) menggunakan perspektif Habermas dalam mengungkap realitas “sustainability” dalam praktik *sustainability reporting* pada BUMN sektor pertambangan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis melalui metode dialektika kritis ini menunjukkan bahwa sejak awal *go public*, ketiga BUMN yaitu Antam, PTBA, dan TINS memang telah sama-sama melaksanakan dan melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan yang terefleksi dalam laporan tahunan maupun *sustainability report*-nya. Namun, dalam melakukan interaksi sosial dengan *stakeholders*-nya ketiga perusahaan tersebut melakukannya dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya penelitian Naraduhita dan Sawarjuwono (2012) menemukan bahwa dari 10 perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan tahunannya, hanya 3 perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan. Berdasarkan klasifikasi sarana tanda, membaca isi kalimat dari data yang dikumpulkan dan dianalisa secara *content analysis* peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, tidak dapat diambil kesimpulan yang pasti akan alasan yang mendorong perusahaan melaksanakan kegiatan CSR nya. Apakah benar-benar karena kesadaran perusahaan akan lingkungan bisnisnya atau karena perusahaan ingin mendapatkan keuntungan bagi organisasi mereka.

2. METODE PENELITIAN

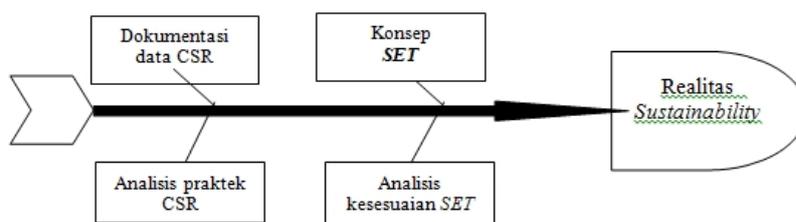
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana penulis menggunakan pendekatan spiritual dalam melihat fenomena akuntansi berdasarkan perspektif *Syariah Enterprise Theory*. Penelitian ini dilakukan pada industri perbankan BUMN syariah di Indonesia dengan alasan spesifikasi mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa: (1) dokumen sosial utama, meliputi laporan tahunan dan *sustainability report* yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut tahun 2016; serta (2) dokumen sosial pendukung, meliputi PSAK, dokumen tentang regulasi terkait CSR, dokumen terkait prinsip-prinsip etika bisnis serta dokumen tentang pedoman *sustainability reporting* dari GRI.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen sosial. Peneliti dapat *download* laporan tahunan dan *sustainability report* dengan mengakses langsung situs setiap perusahaan. Data-data pendukung lainnya yang meliputi PSAK, regulasi terkait CSR, prinsip-prinsip etika bisnis, berita di media, serta pedoman *sustainability reporting* dari GRI.

Untuk menganalisis tingkat kesesuaian *Corporate Social Responsibility (CSR)* industri perbankan berdasarkan *Syariah Enterprise Theory (SET)*. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis dokumen dengan langkah-langkah pokok sebagai berikut:

1. Menganalisis praktek tanggung jawab sosial yang telah dilakukan pada *sustainability reporting*. Tahap ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: mengetahui bagaimana perusahaan memandang konsep tanggung jawab sosial, mengetahui tema apa saja yang telah diungkapkan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, menemukan nilai-nilai spiritual dan menemukan kepentingan dibalik pengungkapan.
2. Menurunkan konsep teoritis pengungkapan CSR berdasarkan konsep *Syariah Enterprise Theory (SET)* sebagai pijakan dasar dalam pelaporan CSR sektor perbankan.
3. Menganalisis kesesuaian pelaporan CSR perbankan syariah dengan teori yang diajukan. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep dalam *Syariah Enterprise Theory (SET)* untuk menentukan kesesuaian antara pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh industri perbankan syariah dengan konsep-konsep yang ada dalam *SET*.
4. Memberikan kesimpulan atas penerapan CSR perbankan syariah, apakah sesuai dengan *SET* atau tidak. Pada tahap ini, penulis juga dapat memberikan saran bagaimana pelaporan CSR yang sesuai dengan konsep *SET*.

Strategi kegiatan penelitian ini akan dilakukan dengan mekanisme seperti yang terlihat dalam *fishbone diagram* berikut:



Gambar 1. Strategi kegiatan penelitian (data diolah (2017))

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode penelitian diatas diperoleh hasil bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM), bank BNI Syariah (BNIS) dan bank BRI Syariah (BRIS) telah melaporkan kegiatan CSR nya. Selain pengungkapan CSR pada laporan tahunan, perusahaan juga secara khusus melaporkan pada laporan keberlanjutan (*sustainability report*). *Sharia Enterprise Theory* (SET) yang dikembangkan berdasarkan “metafora zakat” diimplementasikan oleh BSM, BNIS dan BRIS pada pengelolaan dana CSR yang bersinergi dengan lembaga amal zakat. Adapun Praktik CSR pada bank tiga bank BUMN di Indonesia yaitu BSM, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut.

1) PT Bank Syariah Mandiri (BSM)

BSM meyakini bahwa keberhasilan dan prestasi yang diperoleh merupakan hasil pengelolaan proses bisnis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, nilai ekonomi sebagai manfaat yang dicapai bank, menjadi tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Tema tanggung jawab sosial lingkungan sebagai perwujudan pertumbuhan berkelanjutan dilaksanakan melalui program Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat serta turut serta menjaga kelestarian alam dan kepedulian kepada hak-hak pegawai. Akuntabilitas menurut SET pada BSM meliputi akuntabilitas vertikal sebagai pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Akuntabilitas kepada Allah dapat dilihat pada opini yang diberikan oleh DSN-MUI atau Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (Triuwono, 2006). Opini yang diberikan kepada BSM pada laporan tahunan menyatakan bahwa secara umum aspek operasional dan produk BSM telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta opini syariah dari DPS. BSM belum mengungkapkan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

Pada akuntabilitas horizontal terdiri atas aspek Manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*). Aspek manusia yakni kepada nasabah dan karyawan. Pertanggungjawaban kepada nasabah dengan mengungkapkan kualifikasi anggota DPS dan menyampaikan laporan dana zakat dan dana kebajikan (*qadrul hasan*) serta audit terhadap laporan tersebut. Sesuai dengan misi BSM sebagai bank pilihan yang memberikan manfaat dan menentramkan nasabah. Demikian pula pada aspek kebijakan terhadap SDM, BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. Pertanggungjawaban kepada komunitas diimplementasikan pada ranah spiritualitas, nasionalisme, pendidikan, kesejahteraan. Kegiatan tanggungjawab sosial BSM yang bersumber dari dana zakat dan dana kebajikan. Dana kebajikan disalurkan berasal dari pendapatan non halal, denda dan dana operasional. BSM tidak mengungkapkan dalam laporan keberlanjutan maupun annual report tentang kebijakan/usaha yang dilakukan mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang sebagaimana yang dinyatakan pada konsep SET (Meutia, 2010). Pengungkapan tanggungjawab terhadap lingkungan diimplementasikan oleh BSM dalam bentuk program perbaikan saluran air bersih dan sanitasi, penerapan BSM *green office* sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai.

2).PT Bank BNI Syariah (BNIS)

BNI syariah meyakini, implementasi *maqoshid* syariah secara konsisten akan berujung pada terciptanya gaya hidup hasanah yang sarat kebaikan. Kepada nasabah, hasanah ditunjukkan BNI Syariah dengan memberikan pelayanan terbaik yang akan membuahkan kepercayaan bahwa BNI Syariah merupakan bank amanah dan terpercaya sesuai syariah. Bagi masyarakat dan lingkungan hasanah diwujudkan melalui berbagai program kepedualian dan pemberdayaan dalam wadah tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan akuntabilitas BNIS disampaikan pada *sustainability* dan *annual report*. Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT berupa opini DPS dan disampaikan pada laporan tahunan (*annual report*) BNIS. BNIS mengungkapkan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi seperti sukuk mudharabah dan pengungkapan dan aspek operasional yang tidak dipatuhi berupa kategori ringan (tidak signifikan) yang harus segera diperbaiki sesuai ketentuan syariah. Kategori berat (signifikan) dimana keuntungan yang diperoleh dari akad yang batal harus dibukukan sebagai pendapatan non-halal bank dan harus diakui sebagai dana sosial. Tidak ada pengungkapan kebijakan/usaha yang dilakukan mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang sebagaimana yang dinyatakan pada konsep SET DPS menyampaikan bahwa secara umum kegiatan operasional BNI Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI dan opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional tidak mengarah pada kesalahan dalam membuat kebijakan, melainkan lebih kepada pemahaman individu atau suatu produk dan pedoman operasional Bank.

Pengungkapan akuntabilitas horizontal kepada manusia yakni nasabah berupa kualifikasi DPS dan laporan dana zakat dan dana kebajikan dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan hal 409-421. Laporan tahunan hal. 370 mengungkapkan pendapatan dana non zakat dan penggunaannya. Pendapatan non zakat ini merupakan transaksi non syariah yang berasal dari denda keterlambatan angsuran atau denda lain sehubungan transaksi antar pihak bank dengan pihak ketiga, dana giro pada penempatan pada bank konvensional dan dana sosial dari komisi, *fee* atau dalam pendapatan selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen. Tidak ada penjelasan kebijakan/usaha mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang. Pada akuntabilitas terhadap karyawan berupa kebijakan remunerasi, pelatihan karyawan dan layanan kesehatan serta memiliki *roadmap* pengembangan sumber daya insani. Akuntabilitas kepada komunitas diimplementasikan pada ranah spiritualitas (*character building*), pendidikan, kesehatan, nasionalisme, kesejahteraan dan lingkungan.

Pada pertanggungjawaban terhadap lingkungan, BNIS percaya lingkungan hidup merupakan faktor utama dalam menunjang keberlangsungan bisnis perseroan. Oleh karena itu setiap kegiatan bisnis Perseroan senantiasa memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup (*Annual report* 2016). Selain menginternalisasi sikap peduli lingkungan melalui program dan edukasi dan program GEN-Xtra berupa pengurangan penggunaan kertas dan penghematan energy, melaksanakan kegiatan berorientasi lingkungan, BNIS juga terus berupaya meningkatkan kontribusinya pada pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan sesuai prinsip *profit, people* dan *planet*. Bentuk kontribusi tersebut dilakukan berupa pemberian pembiayaan dan perjanjian kerjasama dengan pengembang property yang mencatumkan persyaratan terkait pelestarian lingkungan dan mewajibkan adanya dokumen terkait lingkungan dan AMDAL sebagai pertimbangan pembiayaan dan pengembang wajib berkomitmen menjaga lingkungan. BNIS juga ikut menyalurkan dana (pembiayaan) ke sektor usaha hijau seperti pembiayaan kepada pengusaha daur ulang plastik, kain perca di segmen mikro dan pengelolaan limbah plastik, beras organik, pengelolaan air bersih dan pupuk organik.

3) PT Bank BRI Syariah (BRIS)

BRIS mengungkapkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban sosial lingkungannya pada laporan tahunan (*annual report*). Tidak ada suplemen laporan berupa laporan keberlanjutan. Akuntabilitas vertical BRIS disampaikan bahwa secara umum aspek operasional dan produknya telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). BRIS belum mengungkapkan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

Pengungkapan akuntabilitas horizontal meliputi akuntabilitas kepada nasabah dengan mengungkapkan kualifikasi DPS. BRIS mengungkapkan laporan dana zakat dan dana kebajikan pada laporan tahunan hal 325. Tidak diungkapkan kebijakan/usaha yang dilakukan mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang sebagaimana yang dinyatakan pada konsep SET. Akuntabilitas terhadap karyawan dilakukan melalui pengungkapan kebijakan upah dan remunerasi maupun fasilitas kesehatan serta pelatihan yang meningkatkan kualitas dan spiritual karyawan. Akuntabilitas kepada komunitas diungkapkan melalui program CSR, BRIS memandang bahwa CSR adalah suatu medium yang baik dalam mewujudkan kontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan citra BRIS di mata masyarakat, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan *competitiveness* BRIS (*annual report*, 2016). Secara umum program CSR diimplementasikan pada ranah spiritualitas, nasionalisme, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban terhadap lingkungan diimplementasikan oleh BRIS dalam bentuk program penghijauan.

4. KESIMPULAN

Realitas *sustainability* yang diwujudkan dalam pertanggungjawaban yang terefleksi pada *sustainability* dan *annual report* diungkapkan oleh BSM dan BNIS sebagai pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*) sebagai wujud kesadaran dengan berprinsip pada komitmen dan ketulusan dalam menjaga kontrak sosialnya. Kesadaran ini merupakan pengungkapan yang wajib dilakukan dalam memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan informasi kepada *stakeholder*. Adapun pemahaman realitas *sustainability* masih dipandang sebagai pengungkapan yang sukarela, bukan sebagai suatu kewajiban sehingga BRIS belum membuat laporan keberlanjutan sebagai wujud akuntabilitas

sosialnya. Laporan tahunan nampak didominasi oleh informasi-informasi keuangan, meskipun BRIS juga telah berupaya menampakkan sisi altruistiknya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa perwujudan akuntabilitas BSM, BNIS maupun BRIS berdasarkan perspektif SET belum maksimal, masih terdapat beberapa pengungkapan penting yang belum dilakukan oleh semua bank ini pada aspek akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal yang terkait dengan lingkungan (*planet*) oleh BSM dan BRIS. Pengungkapan kepedulian terhadap lingkungan berdasarkan SET masih sangat minim. Baik BSM maupun BRIS belum memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu lingkungan. Dalam hal keterlibatan bank sebagai lembaga pembiayaan dengan mengungkapkan pemberian pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan kepada pengembang property maupun perusahaan yang berorientasi dan berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan sebagaimana yang disarankan dalam konsep SET telah dilakukan oleh BNIS.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen sosial, sehingga sangat tergantung pada keabsahan data dan keterbatasan untuk melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak perusahaan. Oleh karena itu, realitas "*sustainability*" yang ditemukan terbatas pada kebenaran yang terefleksi pada dokumen yang dianalisis. Adapun saran yang diberikan yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan konfirmasi secara langsung kepada perusahaan sehingga realitas "*sustainability*" lebih terjamin kebenarannya. Diharapkan pula kepada pihak perusahaan memaksimalkan penerapan akuntabilitasnya berdasarkan *Sharia Enterprise theory* mengedepankan prinsip-prinsip syariah yaitu keadilan, *rahmatan lil alamin* dan *maslahah*, dengan kesadaran penuh menempatkan Allah sebagai pusat segala sesuatu, manusia hanya sebagai wakil-NYA (khalifatullah fil ardh) dengan ketaatan pada tata aturan hukum-hukum Allah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2005. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Chapra, M Umer. 2007. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank.
- Daniri, Mas Achmad. 2008. *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. 18 Agustus. www.google.com.
- Darwin, Ali. 2004. Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*, Yogyakarta.
- Gray, Rob; Kouhy, R; dan Lavers S. 1995. Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of The Literature and A Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2. pp: 47-77.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Meutia,Inten. *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia.2010
- Naraduhita dan Sawarjuwono. 2012. *corporate social responsibility: upaya memahami alasan dibalik pengungkapan csr bidang pendidikan*. Jurnal akuntansi dan auditing: vol2 no.2: 95-189
- Parsa, S., dan R. Kouhy. 2002. Disclosure of Social Information by UK Companies-A Case of Legitimacy Theory. *Global Business and Economics Review-Anthology: 460-473*.
- Solihin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility (From Charity to Sustainability)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, I. Gusti Ayu Omika. 2011. Dialektika dan Refleksi Kritis Realitas "Sustainability" Dalam praktik Sustainability Reporting: Sebuah Narasi Habermas. Aceh: SNA
- Triyuwono, Iwan, 2000. *Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Metodologi Penelitian*. Short Course Metodologi Penelitian Alternatif. FE Unibraw. Malang.
- Triyuwono, Iwan. 2002. *Kearifan Lokal: Internalisasi "Sang Lian" dalam Dekonstruksi Pengukuran Kinerja Manajemen*. (Disampaikan dalam acara Seminar Regional Sehari "Emansipasi Kearifan Lokal untuk Rekonstruksi Sistem Ekonomi dan Bisnis) yang diselenggarakan oleh FE Universitas Brawijaya.